Budaya Strategis dalam Pengetatan Kebijakan Imigrasi Australia Tahun 2001-2015

Rizki Diana Istiqomah

Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai sebab pemerintahan Australia yang berbeda dalam kurun waktu 2001-2015 mengambil kebijakan imigrasi yang substansinya sama. Kebijakan imigrasi Australia yang ketat menyebabkan sejumlah kritik internasional karena dinilai melukai hak asasi manusia pencari suaka yang datang ke Australia khususnya *boat people* yang dinilai sebagai imigran ilegal. Sebaliknya sikap pemerintah tersebut mendapat dukungan publik Australia terutama pasca insiden MV Tampa pada bulan Agustus 2001 yang diikuti dengan serangan terorisme 9/11 di Amerika Serikat. Sejak 2001, isu imigrasi terkait pentingnya perlindungan perbatasan selalu menjadi pembahasan dalam pemilu federal Australia. Penelitian ini menggunakan kacamata budaya strategis untuk mengetahui sebab serta aspek-aspek yang menjadikan pemerintahan berbeda mengambil kebijakan yang cenderung sama dalam kebijakan imigrasi Australia. Penggunaan budaya strategis menyebabkan penelitian ini menekankan pentingnya analisis ke belakang berdasarkan pengalaman sejarah Australia terhadap kasus imigrasi. Penelitian ini menggunakan metode dari Jeannie L. Johnson dengan mengidentifikasi variabel identitas, norma, nilai dan *perceptive lens* untuk menentukan aspek-aspek yang mempengaruhi pembentukan budaya Australia Dengan mengambil jangkauan penelitian dari tahun 2001 hingga tahun 2015, penelitian ini menemukan bahwa pengetatan kebijakan imigrasi dipengaruhi oleh budaya strategis Australia sebagai negara yang selalu merasa tidak aman yang menyebabkannya selalu pesimis dalam melihat keamanannya di dunia.

Kata-Kata Kunci : Australia, kebijakan, imigrasi, budaya, keamanan.

Abstract

This research addresses the explanation regarding the cause of different authorities in Australia government since 2001 to 2015 in taking the immigration policies with same substantion. The strict Australian immigration policies has sparked international critics because it is considered violating the human rights of asylum seekers who had came to Australia especially boat people who are labelled as illegal immigrant. On the contrary, those decisions had earned domestic public support in particular after MV Tampa incident in August 2001 that followed by 9/11 terrorist attack at United States. Since 2001, immigration issue regarding the important of border protection had became discussion in Australia federal elections. This research used strategic culture point of view to explain the motive and aspects that make different authorities in Australia government took the same policies on immigration. The use of strategic culture has caused this research to emphasize the important of backward analysis based on Australia historical experience in immigration cases. This research used the method from Jeannie L. Johnson to identify the variables such as identity, norm, value and perceptive lens to determine aspects that has influenced Australian culture making. Taking into account the period of the year of 2001-2015, the research found out that the strict immigration policies had been influenced by Australian strategic culture as insecure state whose pessimist of their security in the world.

Keywords : Australia, policy, immigration, culture, security.

Pendahuluan

Peristiwa 9/11 mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Australia, dimana Australia berada di posisi unik sebagai negara barat di dekat Asia sekaligus aliansi Amerika Serikat. Kedekatan hubungan Australia dan Amerika Serikat berdampak pada kebijakan *counter terrorism* Amerika Serikat yang mempengaruhi posisi Australia di kawasan (McDougall & Shearman, 2006). Peristiwa 9/11 memperkuat sejumlah isu ras atau etnis di Australia tak terkecuali isu imigran terutama pengungsi dan pencari suaka. Meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi di akhir tahun 1990an terutama dengan insiden MV Tampa pada Agustus 2001 yang membawa 438 pencari suaka dari Afghanistan, menjadi kesempatan bagi pemerintahan Howard untuk menegaskan kembali Australia sebagai benua putih yang sanksi akan kedatangan *boat people.*

Ketika hubungan kerjasama dengan Asia semakin meningkat terjadi sejumlah teror bom di Indonesia seperti Bom Bali yang menewaskan beberapa warga negara Australia (McDougall & Shearman, 2006). Momentum tersebut digunakan Howard untuk membangun wacana budaya kebijakan luar negeri Australia. Serangkaian peristiwa teror tersebut memperkuat agenda kebijakan keamanan yang *xenophobic*akan ancaman keamanan nasional, sehingga kebijakan keamanan menjadi prioritas terutama dalam perlindungan perbatasan. Pengungsi disebut sebagai *non-military threat* daripada disebut sebagai tanggung jawab internasional atas kemanusiaan dibawah *the Refugee Convention* (McPhail, 2007: 110). Dalam kampanye pemilu federal tahun 2001, Howard menegaskan adanya bahaya baru dalam sejarah dunia yang memerlukan tanggapan terkait keamanan nasional terhadap terorisme dan pandangan tanpa kompromi akan hak fundamental negara dalam melindungi perbatasan.

Insiden Tampa dihubungkan dengan isu terorisme terkait perlindungan perbatasan. MV Tampa yang tetap menuju Kepulauan Christmas ditanggapi pemerintah Australia dengan mengerahkan *the Special Air Services* (SAS). Selain itu pemerintah Australia mengambil

kebijakan *Pacific Solution* yang digunakan untuk mengatasi tantangan kedatangan *boat people* dengan membangun *offshore detention facilities*di Nauru dan Pulau Manu, Papua Nugini. Pemerintahan Howard juga menerapkan beberapa kebijakan imigrasi yang ditujukan untuk mengontrol kedatangan *boat people* ke Australia seperti *Temporary Protection Visas* (TPV), *The Border Protection (Validation and Enforcement Powers) Act 2001*, *the Migration Act (section 7A and 245F (8)), Operation Relex, The Migration Amandement (Excision from Migration Zone) Act 2001*.

Sejak saat itu, sejumlah kebijakan terkait pengetatan perlindungan perbatasan terhadap imigran ilegal menjadi isu utama dalam pemilu federal di Australia. Selanjutnya, Perdana Menteri Rudd dari Partai Buruh menerapkan kebijakan yang berlawanan dengan Howard yaitu mengakhiri kebijakan *Pacific Solution* dan TPVdi tahun 2008 (Philips, t.t.). Meningkatnya kedatangan *boat people* pada tahun 2009 menyebabkan Rudd digantikan Gillard di tahun 2010, dalam menghadapi masalah *boat people* Gillard kembali menerapkan kebijakan *offshore detention facilities* di Nauru dan memberlakukan *bridging visa*. Tahun 2013 Rudd kembali menjabat dan memberlakukan kebijakan *New Regional Resettlement Arrangement.* Di tahun yang sama Abbot yang berasal dari Partai Koalisi Liberal-Nasional dalam kampanyenya berjanji akan memberlakukan kebijakan *stop the boats* yang diimplementasikan melalui kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Sejumlah kebijakan tersebut menuai sejumlah kritik internasional bahkan kritik seputar kehidupan *boat people* di *offshore detention facilities* yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Sayangnya pada pemerintahan selanjutnya kebijakan tersebut tetap dilaksanakan.

Perkembangan Kebijakan Imigrasi Australia

Pengetatan kebijakan imigrasi Australia tak terlepas dari pengalaman sejarah Australia yang berasal dari imigran Inggris yang mendirikan koloni untuk narpidana di

Australia pada tahun 1788. Koloni terus berkembang didukung oleh luasnya lahan dan sumber daya alam dimana untuk mengolahnya dibutuhkan sumber daya manusia yang didapatkan melalui kebijakan imigrasi. Pemerintah Inggris mulai mendorong imigrasi untuk pemukim tetap ke Australia selain narapidana sejak sekitar tahun 1820an. Tahun 1840, Pemerintah Inggris membentuk *the Colonial Land and Emigration Commission* yang bertugas mengatur regulasi dan implementasi kebijakan imigrasi ke Australia (Economic and Social Comission for Asia and the Pacific, 1992: 261). Pendatang didominasi imigran asal India, Tiongkok, dan Kepulauan Pasifik sebagai buruh kontrak atau tenaga murah guna mendukung perluasan industri Australia. Penemuan Emas berdampak pada peningkatan kedatangan imigran Tiongkok. Buruh Tiongkok cenderung menetap meskipun habis masa kontrak sehingga dinilai menurunkan upah dan merusak homogenitas ras (Economic and Social Comission for Asia and the Pacific, 1992:261). Hal tersebut membangkitkan ketakutan akan keamanan kewarganegaraan Inggris.Sehingga dibentuklah undang-undang khusus yaitu *Anti-Chinese Legislation* yang diterapkan pemerintah Victoria tahun 1855 dan mengalami sejumlah amandemen sampai dengan *The Chinese Act 1881*dimana penerapannya diikuti oleh pemerintah koloni lainnya.

Sentimen ancaman kedatangan imigran Asia menyebabkan munculnya ide penyatuan koloni. Persemakmuran Australia berdiri pada 1 Januari 1901 di Sydney, dimana kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia masih dipegang oleh Inggris. Isu imigrasi memainkan peranan penting dalam pembentukan persemakmuran dimana keenam koloni menyetujui federasi hanya jika dicapai konsensus terhadap isu imigrasi (Money, 1999: 158). Setelah perundang-undangan terkait pembentukan pemerintah Australia selesai dibuat, undang-undang subtantif pertama yang dirumuskan oleh parlemen adalah mengenai pengaturan masuknya non-warga negara dan pengusiran orang yang tidak diinginkan (Arup, 2006). Hasilnya dibentuklah *The Immigration Restriction Act 1901* atau dikenal dengan *The White*

Australia Policy dimana pendiri persemakmuran memiliki visi bahwa Australia merupakan negara putih dan mempertahankan kebiasaan Eropa.

Pasca Perang Dunia I, pengangguran meningkat di Inggris menyebabkan gagasan migrasi dianggap sesuai untuk mengatasi tekanan dalam negeri sekaligus membantu pembangunan di wilayah persemakmuran kerajaan Britania Raya (Economic and Social Comission for Asia and the Pacific, 1992: 261). Merespon hal tersebut dibentuklah *the Empire Settlement Act of 1922* dimana Inggris bekerjasama dengan Pemerintah Dominion (Australia, Kananda dan Selandia Baru) untuk mengembangkan skema bantuan biaya migrasi. Sayangnya *Great Depression*menyebabkan imigrasi menurun sepanjang tahun 1930an sampai skema migrasi terhenti. Pasca Perang Dunia IIPerdana Menteri Chifley mengumandangkan istilah *populate or perish* yang menekankan pentingnya peningkatan populasi melalui imigrasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjamin keamanan Australia dari serangan asing (Boas, 1999: 10).

Awalnya Menteri Imigrasi Australia Arthur Calwell, memberlakukan sistem rasio dengan menjaring calon imigran asal Inggris, Skandinavia dan Belanda yang dinilai sesuai untuk berasimilasi dengan masyarakat Australia namun gagal karena pulihnya negara-negara tersebut pasca perang berdampak pada penurunan minat migrasi. Target imigran bergeser ke *displaced persons* dari negara-negara Eropa Timur dan Selatan. Hal ini menandai transformasi terhadap kebijakan imigrasi Australia menjadi kebijakan pengungsi, dimana penerimaan pengungsi tidak hanya membawa misi humanitarian pasca Perang Dunia II tetapi juga menguntungkan Australia yang tengah menerapkan kebijakan *populate or perish.*Kebijakan *populate or perish* dinilai sebagai kebijakan eksperimental yang bertujuan mengasimilasi masyarakat Australia sehingga terciptalah *new Australian* dengan dampak sekecil mungkin (Boas, 1999: 11).

Perubahan sejumlah kebijakan imigrasi dengan mengizinkan kedatangan imigran non-Eropa menandai pengenduran *White Australia Policy*yang pertama kali terjadi pada tahun 1966 (Mercieca, 2009: 14). Seperti amandemen 1965 *the Immigration and Nationality Act of 1952* di tahun 1965 menyebabkan sistem kuota dihapuskan dan reuni keluarga menjadi prioritas. Tahun 1970an, doktrin asimilasi mulai digantikan dengan multikulturalisme. Tahun 1973 *The White Australia Policy* diakhiri yang berdampak pada datangnya imigran dari Asia terutama pengungsi Indochina (Castles et.al., t.t.). Pada era ini konsep multikulturalisme secara resmi diperkenalkan dalam debat publik. Multikulturalisme Australia kurang mengutamakan hak-hak sipil dan perlindungan hukum terhadap perkembangan budaya yang berbeda tetapi menekankan bagaimana kelompok yang berbeda-beda tersebut bekerja bersamasehingga mendapatkan perlakuan yang sama (Jupp, 2002: 13).

Kedatangan *boat people* pertama ke Australia terjadi tahun 1976 menandai pergeseran penerimaan pengungsi Eropa menjadi non-Eropa. Terdapat transformasi budaya strategis kebijakan pengungsi dimana penerimaan *boat people* memiliki tujuan kemanusiaan disamping kepentingan Australia terhadap kawasan.Tahun 1977, Departemen Imigrasi Australia menerapkan kebijakan multikulturalisme seiring kedatangan *boat people* sebagai bagian dari identitas Australia serta bagian dari proses memperkuat demokrasi (Krieken, 2012: 509). Disisi lain, meningkatnya kedatangan pengungsi Indochina memberikan tekanan bagi Pemerintah Australia yang kemudian membentuk *the Australia Humanitarian Programme* dan *the Comprehensive Plan of Action*.

Pada tahun 1992, Perdana Menteri Keating memperkenalkan kebijakan *mandatory detention* bagi pencari suaka dengan meningkatkan jumlah pusat penahanan di seluruh Australia (Sratton, 2009: 2). Sehingga pencari suaka yang datang tanpa dokumen resmi akan ditahan sampai permohoan suakanya diterima atauditolak oleh pemerintah Australia. Hal tersebut menyebabkan *boat people* mengalami diskriminasi karena dinilai melakukan

perjalanan tanpa dokumen atau dianggap ilegal. Sedangkan pencari suaka yang datang melalui jalur udara dinilai memiliki dokumen perjalanan resmi sehingga dapat memproses permohonan suaka tanpa ditahan. Meningkatnya kedatangan *boat people* di Australia menjadikan isu tersebut menjadi isu politik. Terpilihnya Pauline Hanson pada pemilihan federal di Queensland tahun 1996 mengawali terciptanya perasaan sentimen rasisme. Tahun 1999 pemerintahan Howard memperkenalkan TPV (*temporary protection visa*) sebagai visa atau izin tinggal sementara pengungsi, sekaligus upaya menyingkirkan pilihan untuk menetap bagi pengungsi.

Insiden Tampa dan peristiwa 9/11 memengaruhi panasnya debat publik dan aktivitas politik di Australia termasuk kebijakan pengungsi khususnya *boat people* yang sebagian besar berasal dari negara yang diindikasikan terlibat dalam kasus terorisme. Untuk merespon peningkatan kedatangan *boat people*, pemerintah Howard mengenalkan kebijakan *Pacific Solution* setelah menyelesaikan negosiasi dan persetujuan kesepakatan dengan Nauru dan Papua Nugini pada September dan Oktober 2001 (Philips, t.t.).*Pacific Solution* merupakan kesepakatan antara pemerintah Australia dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik untuk menampung para pencari suaka ilegal melalui pembangunan *offshore detention facilities*sambil menunggu proses pengurusan dokumen pengesahan sebelum masuk ke Australia.

Selain itu Pemerintah Australia mengeluarkan *The Border Protection (Validation and Enforcement Powers) Act 2001* yang bertujuan melindungi perbatasan Australia dengan menolak dan menangkap pendatang di bawahnaungan *the Migration Act (section 7A and 245F (8))* (McAdam & Purcell, 2008: 96).Tujuan utama undang-undang tersebut adalah untuk mensahkan tindakan yang diambil oleh pemerintah sehubungan dengan insiden Tampa. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah Australia memiliki wewenang untuk memindahkan pendatang ilegal untuk dikirim ke *offshore detention facilities*. September

2001, pemerintah Howard meluncurkan *Operation Relex* yang melibatkan Angkatan Laut dalam melindungi perbatasan agar semakin mempersulit *boat people* mencapai daratan utama Australia.

Pemerintah Australia juga meloloskan *The Migration Amandement (Excision from Migration Zone) Act 2001*sehingga*boat people* yang berhasil lolos dari *Operation Relex*dilarang membuat permohonan visa perlindungan (McAdam & Purcell, 2008: 100).Amandemen dilakukanuntuk mencegah kedatangan *boat people* ke wilayah terpencil dan kemudian mengklaim status pengungsi. Kebijakan Howard terbukti efektif mampu mengurangi jumlah pengungsi ilegal. Serangkaian kebijakan tersebut sekaligus menandai transformasi dalam perkembangan kebijakan imigrasi Australia yang bergeser dari kebijakan pengungsi ke perlindungan perbatasan terhadap *boat people*.

Pada tahun 2007 Howard digantikan oleh Rudd yang berasal dari Partai Buruh. Rudd menerapkan kebijakan berbeda terhadap pengungsi dan pencari suaka dengan mengakhiri *Pacific Solution* pada Februari 2008 (Philips, t.t.).Keputusan Rudd didasari komitmen Australia terhadap program kemanusiaan. Selain itu Rudd juga menghapus kebijakan TPV dengan alasan untuk mempermudah dan memanusiakan proses pencari suaka (Crabb, 2010: 268). Sayangnya tahun 2009 jumlah kedatangan *boat people* kembali meningkat menyebabkan kebijakan Rudd mendapat kritik dari partai oposisi.

Tahun 2010 Rudd digantikan oleh Gillard. Pemerintah Australia menambah *detention center* di Victoria, Queensland, Darwin, Tasmania dan beberapa di wilayah Australia Selatan (Herdianzah, 2013: 47). Pada September 2012 pemerintah Australia menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) *'Relating to the Transfer to an Assessment of Persons in Nauru and Related Issues'*(Herdianzah, 2013: 45). Disepakatinya MoU tersebut menyebabkan kebijakan akan transfer perahu kembali ke *offshore detention facilities*di Nauru.Gillard juga menerapkan kebijakan *bridging visa* yaitu visa sementara yang diberikan

kepada non-warga negara Australia untuk tinggal di wilayah Australia dengan status hukum penuh (Herdianzah , 2013: 48).

Tahun 2013 Rudd kembali menjabat, pemerintah menyatakan bahwa seluruh pencari suaka tidak akan pernah menetap di Australia tetapi akan menjadi *genuine refugee* di Papua Nugini dibawah *the Regional Resettlement Agreement* (Herdianzah, 2013: 48). Melalui *the Regional Resettlement Agreement* juga menandai adanya *PNG solutions* dimana *boat people* akan dikirim dan menetap di Pulau Manu atau dikembalikan ke negara asal. Sehingga terdapat perubahan pola kebijakan dimana sebelumnya pengungsi hanya ditampung di wilayah lain sambil menunggu proses pendaftaran legalitas warga negara menjadi perpindahan tempat tinggal pengungsi dengan status tetap sebagai *genuine refugee*.

Rudd digantikan oleh Abbott yang dalam kampanyenya berjanji akan memberlakukan kebijakan *stop the boats*yang diimplementasikan melalui penunjukan Angus Chambell untuk mengkoordinir kebijakan *Operation Sovereign Borders* pada September 2013 (Brissenden, 2013). Menurut Abbott bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah kematian *boat people* yang datang ke Australia adalah dengan menghentikan perahu dan mengirim kembali ke negara asal. Abbott juga menerapkan kembali kebijakan *offshore detention* yang memang sudah diberlakukan sejak era Howard melalui *Pacific Solution*. Kritik terhadap kebijakan ditambah sejumlah isu kerusuhan di *offshore detention facilities* pada kurun waktu 2014-2015 menyebabkan pemerintahan Abbott memperkenalkan *the Border Force Act*untuk petugas di pusat penahanan.

Pola Budaya Politik Terhadap Perkembangan Kebijakan Imigrasi Australia

Pengetatan kebijakan imigrasi Australia dalam kurun waktu 2001-2015 tidak seluruhnya sama dimana Rudd sempat menghentikan *Pacific Solution* yang menandai perbedaan pilihan kebijakan. Hal tersebut mengindikasikan adanya celah perubahan perilaku Australia dalam menghadapi *boat people*. Sejak berdirinya Persemakmuran Australia budaya

politik Australia telah terbentuk berdasarkan pengalaman sebagai koloni Inggris. Sistem pemerintahan Australia sendiri merupakan campuran antara Amerika Serikat dan Inggris, dimana perdana menteri dan kabinetnya berperan penting dalam pemerintahan dan politik di Australia. Perdana menteri sebagai pemimpin partai dengan dukungan mayoritas parlemen yang kemudian diberikan wewenang untuk membentuk pemerintahan. Perannya yang sentral dalam perpolitikan Australia menyeabkan sepak terjang perdana menteri cepat diketahui oleh masyarakat Australia (Hamid, 1999: 6).

Partai politik merupakan inti dari demokrasi parlementer yang mendominasi sistem politik Australia. Tiap partai memiliki keunikan struktur dan budaya yang merefleksikan sejarah dan nilai yang dianut (Australia Parliamentary Education Office,2017). Terdapat dua partai besar di Australia. Pertama, Partai Buruh yang menganut ideologi sosial demokratis atau sayap tengah-kiri serta memiliki hubungan kuat dengan gerakan kelas pekerja (Dyrenfurth & Bongiorno, 2011: 1). Partai Buruh mendukung *White Australia Policy* karena kedatangan imigran dianggap berpotensi meningkatkan kompetisi lapangan pekerjaan dan mengurangi upah kelas pekerja. Partai Buruh meyakini bahwa kebijakan imigrasi Australia dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi buruh lokal dan menjaga kemurnian rasial (Holbrook, 2016: 405). Namun Chifley dari Partai Buruh menyatakan pentingnya keterlibatan Australia dalam program imigrasi massal (Holbrook, 2016: 405). Chifley memandang pentingnya kebutuhan Australia dalam meningkatkan populasi tanpa meninggalkan *White Australia Policy dengan* mengambil *displaced persons* dari wilayah Eropa lainnya pasca Perang Dunia II. *Populate or perish* dianggap sebagai transformasi kebijakan Partai Buruh dalam menghadapi kebutuhan imigran sekaligus menjadi transformasi budaya strategis kebijakan imigrasi Australia terhadap kebijakan pengungsi.

Pemerintahan Whitlam dari Partai Buruh ditahun 1972 mengusung program untuk mengakhiri *White Australian Policy* secara resmi. Alasannya untuk meningkatkan hubungan

Australia dengan negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika (Whitington, 2012). Penghapusan sisa-sisa nilai *White Australia Policy* menandai diperkenalkannya konsep multikulturalisme sebagai upaya menghilangkan kesan Australia sebagai masyarakat yang bermusuhan terhadap masyarakat di kawasan Asia Pasifik (Whitlam Institute, 2017).

Sepanjang pemerintahan Hawke dari Partai Buruh tahun 1983-1991, isu seputar pengungsi Indochina mendominasi kebijakan imigrasi. Hawke mengaitkan penghentian arus kedatangan *boat people* dengan perlunya membendung arus pengungsi komunis yang keluar dari Vietnam pasca konflik. Hal tersebut mencerminkan keinginan untuk mengembalikan pengetatan kebijakan pengungsi. Dibawah pemerintahan Keating dari Partai Buruh tahun 1992, Australia secara resmi mendirikan *mandatory detention* melalui amandemen legislatif pada 5 Mei 1992 untuk menyikapi naiknya jumlah kedatangan *boat people* pada tahun 1989 (Garnier & Cox, 2015: 2).

Kedua, Partai Koalisi Liberal-Nasional dimana pembentukan koalisi menggambarkan hubungan kaum perkotaan atau kapitalis kelas menegah yang liberal dan konservatif dengan kaum pedesaan dalam melawan gerakan buruh. Partai Koalisi Liberal-Nasional merupakan pendukung *White Australian Policy*, melalui pernyataan Perdana Menteri Menzies tahun 1949 bahwa kebijakan imigrasi Australia bertujuan untuk memelihara populasi yang homogen sebagai persemakmuran Inggris (Department of the Prime Minister and Cabinet, t.t.). Dibawah pemerintahan Holt tahun 1966 terdapat kelonggran pembatasan izin masuk imigran non-Eropa dengan mengurangi lama persyaratan tinggal (Kirk, 2008: 57). Tahun 1971, pemerintahan McMahon menekankan kebijakan imigrasi berdasarkan *skill.* Tahun 1975 dibawah pimpinan Fraser, untuk pertama kalinya Australia menjadi negara pengungsi dengan mendaratnya *boat people* di Darwin tahun 1976 (Tiffen, t.t.: 97). Fraser juga memperkenalkan konsep multikulturalisme pada masyarakat Australia.

Howard tidak menyetujui keputusan pemerintahan Fraser terhadap konsep multikulturalisme dalam menghadapi pengungsi Indochina. Howard meyakini pendatang hendaknya menyesuaikan diri mengikuti budaya masyarakat Australia dalam konteks bangsa Eropa. Howard memenangkan pemilu 1996 dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat Australia terhadap serangan multikulturalisme, hak tanah Aborigin, dan posisi Australia di Asia (Murray, 2010: 189). Howard memahami bahwa masyarakat Australiadikejutkan dengan gagasan Hanson tahun1996 yang berdampak pada peningkatan sentimen rasisme yang dinilai sebagai kesempatan sayap kanan/konservatif untuk memperluas pengaruh melalui perlawanan terhadap imigran (Murray, 2010: 183).

Pemilu 2001 dinilai unik karena isu utama yang dibahas merupakan isu keamanan dimana sebelumnya cenderung didominasi oleh isu ekonomi. Howard menawarkan kebijakan perlindungan perbatasan terhadap *boat people.*Peristiwa 9/11 dimanfaatkan untuk mengesahkan undang-undang yang dalam keadaan normal tidak akan melewati konsensus publik dan kemudian gagal melewati parlemen atau kongres (Mercieca, 2009: 30). Isu perlindungan perbatasan terus berkembang dimana pemerintahan Howard yang berasal dari Partai Koalisi Liberal-Nasional diuntungkan dengan meningkatkan elektabilitas untuk memperkuat posisi Howard dalam pemilu.

Sedangkan pada pemilu 2007, Partai Buruh menunjukkan pendekatan baru dalam kebijakan menangani kedatangan *boat people*. Partai Buruh mengumumkan program kemanusiaan yang lebih adil dan fleksibel dimana penahanan pencari suaka hanya digunakan untuk pemeriksaan kesehatan, identitas dan keamanan (McKay et.al., 2017: 12). Rudd mengkritisi pendekatan Howard dalam mengatasi *boat people* yang dinilai merusak reputasi internasional Australia. Pendekatan Rudd dinilai penting sebagai langkah awal mengembangkan diplomasi regional yang lebih efektif dan lebih dekat antara Australia dan Asia, khususnya Asia Timur. Motivasi utama Rudd ialah mengembangkan

lingkungankeamanan yang kuat demi menyeimbangkan kepentingan yang saling berlawanan oleh dua kekuatan strategis terbesar di kawasan Asia Pasifik yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok (Pietsch, et.al., 2010: 164).

Namun peningkatan kedatangan pencari suaka di tahun 2009 dinilai sebagai kegagalan. Juni 2013, Rudd kembali menjabat danmenerapkan *Regional Resettlement Arrangement*. Kebijakan ini menetapkan semua pencari suaka akan menetap di Nauru atau Papua Nugini (Warbrooke, 2014: 1). Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa Rudd tidak bisa melepaskan pendekatan kebijakan yang diturunkan dari Howard. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya memisahkan diri dari wacana ilegalitas dan kriminalitas yang dihubungkan dengan *boat people* meskipun menyajikannya dalam masalah kemanusiaan (Warbrooke, 2014: 1).

Sedangkan Gillard berencana menggantikan *Pacific Solution* dengan mendirikan pusat pemrosesan regional di Timor Leste namun ditolak oleh Parlemen Timor Leste pada 2011 (Martins, 2011). UsahaGillard lainnya yaitu dengan menggandeng Malaysia namun kembali gagal pada 2011. Sebagai gantinya, *boat people* diberikan *bridging visa* dan ditempatkan di dataran utama selama periode pemeriksaan dan pemrosesan suaka.Tahun 2012, Gillard membuka kembali *offshore detention facilities* di Nauru. Kesepakatan tersebut dilanjutkan oleh Rudd di tahun 2013 dengan memperbarui kesepakatan agar Nauru dan Papua Nugini menjamin seluruh *boat people* baik yang permintaan suakanya diterima atau ditolak untuk menetap (Curley & Vandyk, 2017: 42).

Sedangkan Abbott kembali menggunakan istilah *Pacific Solution* untuk menyebut kebijakan dalam menangani *boat people* melalui *offshore detention facilities* di Pulau Manu dan Nauru. Abbott melibatkan kekuatan militer untuk berpatroli di perairan Australia dan menangkap perahu pencari suaka serta membuat *boat people* tersebut kembali dengan menggunakan *lifeboats* (BBC, 2016). Keterlibatan militer dalam menjaga perbatasan

diharapkan dapat meyakinkan publik bahwa perbatasan Australia aman (McKay et.al., 2017: 18). Insiden Tampa telah menjadi titik balik kebijakan imigrasi Australia yang lebih merujuk pada kebijakan keamanan nasional terkait perlindungan perbatasan.Kedua partai mayoritas mendukung pengetatan kebijakan imigrasi terhadap *boat people*.

Analisis Pengetatan Kebijakan Imigrasi Australia

Menurut Jeannie L. Johnson terdapat empat variabel untuk menentukan budaya nasional yaitu identitas, nilai, norma dan *perspective lens* (Johnson, 2006: 11). Pertama, identitas yang dimaksud disini adalah identitas nasional yaitu pandangan atau kepercayaan yang sama dalam negara-bangsa untuk mengidentifikasi dirinya dan membedakannya dari bangsa lain. Untuk memahami identitas Australia, perlu diketahui bagaimana Australia memandang dirinya. Menurut Cheesman (dalam Connors, 2004: 60) Australia selalu menjadi *frightened country* karena takut terhadap serangan eksternal dan dominasi Asia diiringi keyakinan bahwa Australia tidak mampu melindungi dirinya sendiri sehingga senantiasa mencari *great and powerfull friend* untuk menjamin keamanannya. Sejak era kolonisasi Australia dikenal dengan wilayahnya yang kaya dan terisolasi, yang kemudian mempengaruhi kekhasan perilaku dan pemikiran Australia akan posisinya di dunia. Kekhasan tersebut terlepas dari faktor geografis dan faktor demografis Australia.

Faktor geografis Australia dinilai rentan karena mayoritas penduduk Australia berasal dari Inggris telah terisolasi dari tanah dan budaya asalnya di benua Eropa. Selain itu wilayah Australia yang luas dan berbatasan dengan Asia di utara semakin melekatkan pemikiran akan kerentaran geografis Australia. Sebagai negara dengan jumlah populasi yang kecil, Australia memandang dirinya rawan sebagai target serangan negara yang padat penduduk yaitu Asia. Perasaan takut mengenai kapasitas pemukiman untuk bertahan dari lingkungan luar, juga

didorong oleh rasa takut bahwa kemakmuran Australia dapat diambil oleh kekuatan pemangsa (Bisley, 2016: 11)..

Isu utama dalam masalah demografis Australia adalah kesadaran akan perbedaan budaya, bahasa dan agama yang besar dengan negara-negara tetangga di Asia. Vucetic menggunakan istilah *anglosphere* untuk mengkonseptualisasikan identitas bersama komunitas negara-negara berbahasa Inggris, serta kesamaan nilai dan institusi yang dikaitkan dengan kesamaan historis dari Inggris (Vucetic, 2008: 1-3). Dalam Bahasa Inggris di tahun 1890an, beberapa istilah seperti negara, rakyat, bangsa dan kebangsaan secara luas digunakan secara bergantian dengan istilah ras (Vucetic, 2008: 95). Hal tersebut menjadikan ras menjadi salah satu pilar dalam peradaban Anglo-Saxon.

Kemenangan Jepang dari Rusia tahun 1905, menyebabkan Jepang menjadi negara Asia yang diperhitungkan oleh negara-negara Eropa. Begitupula Australia yang menganggap kemenangan Jepang sebagai ancaman. Pada Perang Dunia II, masuknya militer Jepang ke Asia Tenggara menimbulkan ancaman keamanan bagi Australia yang pertahanannya masih bergantung pada Inggris.Ketakutan invasi Jepang menyebabkan kekhawatiran akan keamanan Australia disamping kurangnya bantuan dari Inggris menyebabkan Australia mencari bantuan ke Amerika Serikat. Ancaman berubah kembali menjadi persebaran komunis di Asia pada era Perang Dingin. Australia kembali bekerjasama dengan Amerika Serikat melalui *ANZUS Treaty*. Dari sini dapat dilihat sekaligus menkonfirmasi bahwa Australia selalu menjalin aliansi dengan *great and powerfull friend* untuk menghadapi ancaman eksternal. Namun berakhirnya Perang Dingin menimbulkan kekhawatiran bagi Australia terhadap ketidakpastian keamanan kawasan.

Dalam menghadapi ancaman perbatasan pasca 9/11, Howard menekankan hubungan tradisional Australia dalam ANZUS untuk menghadapi ancaman eksternal. Amerika Serikat

sebagai sesama *anglosphere*, menguatkan persepsi ancaman kemungkinan bahwa Australia menjadi salah satu target terorisme. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *boat people* berpotensi mengancam keamanan Australia dimana pengungsi tersebut mayoritas berasal dari negara konflik yang memudahkan penyelundupan manusia dan masuknya jaringan terorisme atau kriminal lainnya masuk ke Australia. Dengan demikian, penulis menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa identitas Australia sebagai negara yang selalu merasa tidak aman atau *insecure.*

Kedua, nilai yaitu prinsip yang digunakan untuk berperilaku dengan cara tertentu dibandingkan cara yang lain.Sebagai negara yang selalu merasa *insecure*, keamanan nasional Australia menjadi hal fundamental sehingga pengetatan kebijakan imigrasi khususnya *boat people* yang datang dengan budaya berbeda serta dinilai ilegal merupakan bagian dari upaya kontrol perbatasan.Kembali kepada pengalaman sejarah Australia, untuk kelas penguasa Anglo-Australia, kolonialisasi merupakan hal fundamental dalam membentuk pandangan mereka terhadap apa yang mereka lakukan didunia, dimana koloni Australia berada di garis depan Kerajaan Inggris untuk memperluas peradaban dalam sejarah manusia (Wesley, 2009: 114). *White Australia Policy* secara jelas menunjukkan bahwa ras merupakan elemen utama dalam evolusi kemerdekaan Australia. Ras menggambarkan solidaritas dengan negara Anglo-Saxon lainnya dan menjadi elemen yang membentuk undang-undang pertama yang disahkan oleh Persemakmuran Australia.

Perlindungan perbatasan merupakan upaya pertahanan Australia dari ketakutan serangan kekuatan eksternal. Sehingga kecemasan untuk bertahan yang kuat menghalangi adanya bentuk integrasi dengan identitas budaya yang berbeda (Papastergiadis, 2004: 12).Hal tersebut menjadikan tidak bertahan lamanya Australia dalam menekankan nilai multikulturalisme meskipun *White Australia Policy* diakhiri. Gagasan Hanson memunculkan kembali nilai rasisme ala *White Australia Policy.* Antitesis nilai multikulturalisme menguat

ketika Howard berhasil mengolah ketakutan akan isu terorisme dan *boat people* dalam bentuk kebijakan kontrol perbatasan. Sehingga elemen rasial tak bisa dipisahkan dalam membentuk nilai kebangsaan Australia yang *xenophobic*meskipun telah diganti oleh ide multikulturalisme. Sehingga nilai yang dianut Australia terkait pengetatan kebijakan imigrasi Australia adalah *white Australia.*

Ketiga, norma adalah ketentuan yang diyakini bersama sebagai panduan bertingkah laku seorang aktor. Pengetatan kebijakan imigrasi Australia terhadap*boat people,*menghasilkan sejumlah isu dan kritik terkait masalah hak asasi manusia. Australia sebagai salah satu negara peratifikasi *The UN Refugee Convention 1951* tentu mengetahui adanya prinsip non-diskriminasi, *non-penalization* dan *non-refoulement* yang secara jelas dilanggar dalam menyikapi *boat people.* Norma demokrasi liberal secara sempit membatasi berbagai situasi di mana demokrasi dapat membenarkan penggunaan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri atas ancaman keamanan, meskipun lebih mengutamakan cara damai melalui institusi internasional di level internasional.

Dalam menghadapi ancaman eksternal, sejak awal federasi Australia menjalin aliansi dengan *great and powerfull friend*. Namun berakhirnya Perang Dingin menyebabkan Australia perlu mengkaji ulang strategi keamanan pertahanannya akibat ketidakpastian kondisi terutama terhadap Asia. Dikeluarkannya *Nixon Doctrine* untuk mengakhiri Perang Vietnam, direspon Australia dengan perlunya kemandirian pertahanan yang diatur dalam kerangka aliansi dan kerjasama regional. Burns dan Eltham (2014: 190) menyebut pergeseran keamanan tersebut sebagai *the Self-Reliance School* muncul seiring dengan adanya *Defence of Australia White Paper* (DOA) 1987. Hill (2011: 12) menyatakan bahwa konsep DOA memiliki dua implikasi terhadap hubungan aliansi yaitu memperkuat preferensi keamanan dan memperkuat ketergantungan. Pentingnya Amerika Serikat sebagai *great and powerfull friend* tercermin dalam dukungan Australia dalam *war on terrorism*. Meskipun *self-reliance*

diartikan sebagai kemandirian keamanan namun sebagai salah satu entitas internasional Australia tetap menyadari pentingnya menjalin kerjasama untuk melindungi kepentingan strategisnya. Sehingga norma yang dipegang Australia terkait kebijakan pengetatan imigrasi tak lain sebagai bentuk kemandirian perlindungan keamanan nasional atau *self-reliance* yang telah tertulis dalam doktrin pertahanan Australia.

Keempat, *perceptive lens* adalah keyakinan benar atau salah yang mewarnai begaimana suatu aktor memandang dunia (Johnson, 2006: 12). Mitos nasional Australia terkait posisinya didunia meliputi ketakutan akan agresi dari utara atau Asia. Rasa tidak aman Australia akan serangan eksternal tak terlepas dari sejarah kependudukan Australia oleh Inggris terhadap penduduk asli suku Aborigin. Orang Australia dihantui gagasan bahwa apa yang dilakukan Inggris terhadap penduduk asli Australia yaitu suku aborigin mungkin dapat terjadi kembali. Hal tersebut selanjutnya mempengaruhi pandangan mengenai posisi Australia di dunia dan pilihan kebijakan yang dibuat. Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan populasi kulit putih melalui kebijakan imigrasi selanjutnya menjadi tujuan untuk menghadapi ancaman.

Meskipun kalah pada Perang Dunia II, keberhasilan Jepang dalam mengalahkan Rusia yang merupakan negara Barattelah menghancurkan mitos dunia akan superioritas bangsa Eropa. Sehingga kekalahan Jepang tetap menjadikan Asia sebagai sumber ancaman potensial bagi keamanan Australia (Smith, t.t.: 485). Sebagai negara kepulauan, Australia telah memiliki pengalaman diserang melalui jalur laut (McAdam, 2013: 436).Serangan tersebut digambarkan melalui kedatangan imigran non-Eropa seperti buruh kontrak Tiongkok pada era *gold rush.* Tak terkecuali saat ini merujuk pada *boat people*yang awalnya mayoritas berasal dari Indochina yang komunis pada era Perang Dingin, bergeser menjadi *boat people* yang mayoritas berasal dari negara-negara yang rawan akan terorisme dan penyelundup manusia.Meskipun *White Australian Policy* berakir namun pengaruh struktural akan khayalan

nasional belum sepenuhnya surut (Papastergiadis, 2004: 11). Peristiwa 9/11 memunculkan ketakutan akan bentuk ancaman baru bagi Australia, dimana sebelumnya insiden Tampa yang membawa *boat people* dari Afghanistan dimanfaatkan elit politik untuk memperkuat *xenophobia* akan datangnya terorisme ke Australia menjelang diselenggarakannya pemilu di akhir tahun 2001. Hal tersebut ditanggapi pemerintah dengan memberlakukan pengetatan kebijakan imigrasi yang menargetkan *boat people*.

Realisme Australia tidak berfokus pada bagaimana menggunakan kekuatan tetapi apa yang harus dilakukan dengan kurangnya kekuatan (Wesley, 2009: 327). Berdasarkan pengalaman sejarah Australia terhadap sikap Inggris pada Perang Dunia II dan sikap Amerika Serikat pasca kekalahan Perang Vietnam, maka Australia mempelajari bahwa negara kuat dengan mudah dapat melupakan kepentingan strategis Australia. Pengalaman tersebut memicu pesimisme Australia terhadap keamanannya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka diambil kesimpulan bahwa kebijakan imigrasi Australia tahun 2001-2015 cenderung sama meski pemerintah berasal dari partai politik berbeda. Pengetatan kebijakan yang secara spesifik ditujukan kepada *boat people* pada kurun waktu 2001-2015 disebabkan adanya kesamaan kepercayaan yang menghasilkan perilaku yang sama. Adapun aspek-aspek yang mendorong perilaku tersebut dijelaskan melalui budaya strategis yang diidentifikasi oleh Jeannie L. Johnson melalui empat variable yaitu identitas, norma, nilai dan *perceptive lens.* Peneliti mengidentifikasi bahwa identitas Australia sebagai negara yang selalu merasa *insecure,* nilai *white Australia* sebagai pembentuk identitas kebangsaan, norma *self-reliance* yang tertuang dalam doktrin pertahanan dalam menanggapi kebijakan imigrasi dan pesimisme sebagai *perceptive lens* Australia dalam memandang keamanannya di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Connors, Michael K.. *Australia in the Asia Pasific dalam The New Global Politics of the Asia Pacific ,* (Routledge, 2004).

Crabb, Annabel. *Rise of the Ruddbot: Observations from the Gallery, (*BlackInc, 2010), Google Books.

Dyrenfurth, Nick & Frank Bongiorno, *A Little History of the Australian Labor Party*, (UNSW Press, 2011), Google Books.

Economic and Social Comission for Asia and the Pacific," Country Monograph Series No. 9: Population of Australia vol. 2", (United Nations, 1992).

Hamid, Zulkifli. *Sistem Politik Australia,* (Laboratorium Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Penerbit Rosdakarya, 1999).

Jupp J. *From White Australia to Woomera: The Story of Australian Immigration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) , Google Books.

McDaougall, Derek & Peter Shearman, *Australian Security After 9/11: New and Old Agendas* (Ashgate Publishing, 2006), Google Books.

Money, Jeannete. *Fences and Neighbors: The Political Geography of Immigration Control*, (Cornell University Press, 1999) Google Books.

Jurnal Ilmiah

Bisley, Nick ."Australia's Strategic Culture and Asia's Changing Regional Order", *The National Bureau of Asian Research*, NBR Special Report 60, 2016.

Burns, Alex & Ben Eltham, "Australia's Strategic Culture: Constraints and Opportunities in Security Policymaking", *Contemporary Security Policy*, 35:2, 187-210, 2014.

Curley, Melissa & Kahlia Vandyk, "The Securitisation of Migrant Smuggling in Australia and Its Consequences for the Bali Process", Australia Journal of International Affairs vol. 71 issue 1, 2017.

Garnier, Adele & Llyold Cox, "Twenty Years of Mandatory Detention: The Anatomy of a Failed Policy", Politics and International Relations. Macquire University, 2015.

Herdianzah , Muhammad Rifqi, " Kebijakan Pemerintah Australia Terkait Permasalahan Irregular Maritime Arrivals Periode Kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard Tahun 2010-2012", *Skripsi Ilmu Hubungan Internasional,* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2013).

Hill, Mattew "Strategic Cultue and Alliance Shift: Exploring New Zealand and Australia's Divergent Security Engagement with the United States", 1987-2011.

Holbrook, Carolyn "The Transformation of Labor Party Immigration Policy 1901–1945", *Journal of Australian Studies* 40:4 pp. 403-417, 2016.

Johnson, Jeannie L. "Strategic Culture: Refining The Theoretical Construct", *Comparative Strategic Cultures Curriculum,* 2006.

Kirk, Neville. "Traditionalist and Progressives", *Australian Historical Studies* 39:1 pp. 53-71, 2008.

Krieken, Robert van "Between Assimilation and Multiculturalism: Models of Integration in Australia, *Patterns of Prejudice*, 46:5, 2012.

McAdam, Jane & Kate Purcell, "Refugee Protection in the Howard Years: Obstructing the Right to Seek Asylum, *AustralianYear book of Internasional Law*, vol. 27, 2008.

McPhail, Alison May "John Howard's Leadership of Australian Foreign Policy 1996 to 2004: East Timor and the War Against Iraq – The National Leader at theNexus of Domestik and Foreign Affairs', *Department of Politics and Public Policy*, Griffith University, 2007.

McKay, Fiona H et.al., "Compassionate Deterrence: A Howard Government Legacy", *Politics and Policy*, 45: 169–193, 2017.

Papastergiadis, Nikos. "The Invansion Complex in Australian Political Culture", *Thesis Eleven*, SAGE Publication, 2004.

Pietsch, Juliet et.al., "Generational Change: Regional Security and Australian Engagement with Asia", *The Pacific Review*, 23:2, 163-181, 2010.

Sratton, Jon. "Preserving White Hegemony: Skilled Migration, Asians and Middle-Class Assimilation", *Borderland* vol. 8 no. 3, 2009.

Vucetic, Srdjan. " The Anglosphere: A Genealogy of an identity in International Relations", *Dissertation The Ohio University*, 2008.

Warbrooke, Aulden. "Australia's 'Pacific Solution': Issues for the Pacific Islands", *Asia & the Pacific Policy Studies*, Vo. 1, Issue 2, 2014.

Wesley, Michael . "The Rich Tradition of Australian Realism", *Australian Journal of Politics and History*, Vol 55 no 3. pp 324-334, 2009.

Online

Arup, Christoper. "Labour Law and Labour Market Regulation: Essays on the Construction, Constitution and Regulation of Labour Markets and Work Relationship*", (* Federation Press,2006),http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/1707791/31_3_15.pdf (diakses pada 27 Agustus 2017).

Australia Parliamentary Education Office, "Parliamnet and Congress, Australia Parliamentary Education Office", http://www.peo.gov.au/learning/closer-look/parliament-and-congress.html (diakses pada 23 April 2017).

BBC. "Australia Asylum: Why is it Controversial?", BBC, 3 Agustus 2016. http://www.bbc.com/news/world-asia-28189608 (diakses pada 15 September 2017).

Boas, E. Chapter 2: The Nature of Arthur Calwell's Displaced Persons Scheme dalam *"Leading dual lives", Lithuanian displaced persons in Tasmania.* School of History and Classics, University of Tasmania, Australia. 1999. https://eprints.utas.edu.au/7913/2/02_wholeBoas.pdf(diakses pada 10 Mei 2017).

Brissenden, Michael. "Tony Abbott Appoints Angus Campbell to Lead Operation Sovereign Borders Policy", 2013, http://www.abc.net.au/news/2013-09-17/angus-campbell-to-oversee-abbotts-border-protection-plan/4963732 [diakses pada 14 Desember 2016].

Castles, Stephen et.al., "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World", www.age-of-migration.com/uk/casestudies/11.1.pdf (diakses pada 10 Mei 2017).

Department of the Prime Minister and Cabinet, http://pmtranscripts.pmc.gov.au/sites/default/files/original/00000069.pdf. (diakses pada 3 Juni 2017)

Mercieca,Paul. "Australian Refugee policy and Party Rhetoric in Contrast: A Study of the Hawke/Keating and Howard Government". (Edith Cowan University, 2009), http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2398& context=theses_hons (diakses pada 2 Februari 2017).

Murray, ML (Kim). "John Howard: A Study in Policy Consistency", (Thesis Discipline of Politics, School of Politics and History University of Adelaide, 2010), https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/ 2440/70068/8/02whole.pdf (diakses pada 27 Agustus 2017).

Martins, Vasco. "Timor Leste's David and Goliath Clash with Australia", Portugese Institute of International Relations and Security (IPRIS), 2011, www.ipris.org/php/download.php?fid=491, (diakses pada 22 September 2017)

Phillips, Janet. "Temporary Protection Visas", *Research Note Department of Parliamentary Services* No. 51, https://www.aph.gov.au/ binaries/library/pubs/rn/2003-04/04rn51.pdf [diakses pada 14 Desember 2016].

Philips, Janet, "The Pacific Solution Revisited: s Statistical Guide to the Asylum Seeker Caseloads on Nauru and Manus Island, http://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/bn/2012-2013/pacificsolution (diakses pada 2 Februari 2017).

Tiffen, Rodney "The White Australia Policy and Asian Immigration", http://www.i-repository.net/contents/outemon/ir/501/501851208.pdf, (diakses pada 27 Agustus 2017).

Whitington, Luke. "The End of the White Australia Policy in the Australian Labor Party: a Discursive Analysis with Reference to Postcolonialism and Whiteness Theory", University of Sydney, https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/8841/1/Whitington,L_Thesis_2012.pdf. (diakses pada 2 Februari 2017).

Whitlam Institute, "Foreign Affairs and Immigration", *Whitlam Governement Achievement*, Tersedia di https://www.whitlam.org/gough_whitlam/achievements/foreignaffairsandimmigration (diakses pada 2 Juni 2017).